



Interseksi Politik dan Etika dalam Hermeneutika Ilmiah: Telaah Mendalam Terhadap Tafsir Klasik

Muhamad Alif Zibran¹, Ardan Al-fariz², Delvin Hanif Pramudita³, Khoiri Rizki Idzni Robik⁴, Andi Rosa⁵.

¹²³⁴⁵ Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassandudin Banten

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

alifzibran414@gmail.com,
ardanalfariz08@gmail.com,
dlvnhanif@gmail.com,
Idznirobik1@gmail.com,
andi.rosa@uinbanten.ac.id.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji interseksi krusial antara politik dan etika dalam hermeneutika ilmiah, berfokus pada telaah mendalam terhadap tafsir klasik. Latar belakang studi ini berangkat dari pengakuan bahwa interpretasi teks, terutama dalam ranah keagamaan dan keilmuan, tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu bersinggungan dengan dinamika kekuasaan dan pertimbangan moral. Tujuannya adalah untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana politik dan etika memengaruhi konstruksi makna dalam tafsir klasik. Mengadopsi metode kualitatif, penelitian ini menggunakan studi pustaka ekstensif dan analisis kasus, dengan *Tafsir al-Tabari* sebagai contoh utama. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa politik interpretasi (melalui dukungan legitimasi kekuasaan dan pembelaan ortodoksi) dan etika interpretasi (melalui penekanan pada nilai moral dan tanggung jawab sosial) secara signifikan membentuk metodologi dan kesimpulan penafsiran, yang berujung pada ko-konstruksi makna. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pemahaman holistik terhadap tafsir klasik menuntut pengakuan atas dimensi politik dan etika yang melekat di dalamnya.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Politik, Etika, Tafsir Klasik, Makna*

ABSTRACT

This study examines the crucial intersection between politics and ethics in scientific hermeneutics, focusing on an in-depth analysis of classical exegesis (tafsir). The background of this study stems from the recognition that text interpretation, particularly in religious and academic domains, is never entirely neutral, but always interacts with power dynamics and moral considerations. The objective is to comprehensively delineate how politics and ethics influence the construction of meaning in classical exegesis. Adopting a qualitative methodology, this research employs extensive library research and case analysis, with Tafsir al-Tabari as a primary example. The findings indicate that the politics of interpretation (through legitimizing power and defending orthodoxy) and the ethics of interpretation (through emphasizing moral values and social responsibility) significantly shape the methodology and

*Corresponding author

E-mail addresses: alifzibran414@gmail.com

conclusions of exegesis, leading to a co-construction of meaning. Thus, it is concluded that a holistic understanding of classical exegesis necessitates acknowledging its inherent political and ethical dimensions.

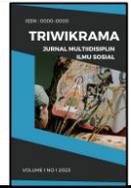
Keywords: *Hermeneutics, Politics, Ethics, Classical Exegesis, Meaning*

1. PENDAHULUAN

Hermeneutika, sebagai disiplin interpretasi, telah lama menjadi landasan fundamental dalam memahami teks, khususnya dalam konteks keilmuan dan keagamaan (Franz Magnis-Suseno, 2016). Namun, pada praktiknya, proses penafsiran tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu bersinggungan dengan berbagai faktor eksternal, termasuk politik dan etika. Interseksi antara politik, etika, dan hermeneutika ilmiah merupakan area penelitian yang krusial, terutama ketika menelaah tafsir klasik yang kaya akan konteks sejarah, budaya, dan ideologi. Topik ini menjadi semakin relevan dalam era kontemporer, di mana polarisasi pemikiran dan interpretasi teks-teks penting seringkali dipengaruhi oleh agenda politik dan bias etis yang tersembunyi. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk mengembangkan kerangka hermeneutik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan komprehensif, yang mampu melampaui reduksionisme dan objektivitas semu.

Secara umum, hermeneutika ilmiah, terutama dalam tradisi tafsir klasik, seringkali dianggap sebagai upaya untuk mengungkap makna otentik dari sebuah teks melalui metode yang ketat dan objektif (Ilmu et al., n.d.). Namun, pandangan ini mengabaikan fakta bahwa setiap penafsir, terlepas dari klaim objektivitasnya, selalu beroperasi dalam kerangka pemahaman yang dibentuk oleh latar belakang sosial, politik, dan etisnya. Kebijakan politik suatu era, norma-norma moral yang berlaku, serta kepentingan-kepentingan kekuasaan dapat secara halus maupun eksplisit memengaruhi pilihan interpretatif, penekanan makna, bahkan pengabaian bagian-bagian tertentu dari teks. Demikian pula, pertimbangan etis terkait keadilan, kebenaran, atau implikasi sosial dari suatu penafsiran seringkali turut membentuk arah dan kesimpulan dari proses hermeneutik. Generalisasi ini menegaskan bahwa tidak ada tafsir yang benar-benar "murni" dari pengaruh-pengaruh eksternal, dan oleh karena itu, analisis mendalam terhadap interseksi ini menjadi sangat penting untuk memahami secara utuh bagaimana makna dikonstruksi dan diterima dalam tradisi keilmuan.

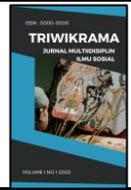
Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji aspek hermeneutika dari berbagai sudut pandang. Beberapa telah menyoroti peran konteks historis dan linguistik dalam pembentukan makna (Hidayatullah, 2021), sementara yang lain berfokus pada dimensi filosofis dan teologis dari interpretasi (Helmi & Rahmaniah, 2020). Namun, kajian yang secara eksplisit dan mendalam mengintegrasikan politik dan etika sebagai variabel sentral dalam hermeneutika ilmiah, khususnya dalam konteks tafsir klasik, masih relatif terbatas (Masyitha, 2015). Sebagian besar studi cenderung membahas pengaruh politik atau etika secara terpisah, atau hanya menyentuh aspek-



aspek tersebut secara implisit. Misalnya, beberapa penelitian telah menganalisis bagaimana ideologi politik tertentu memengaruhi penafsiran teks-teks keagamaan (Mailasari, 2013), atau bagaimana norma-norma etika memandu interpretasi hukum (Weruin et al., 2016). Namun, jarang ditemukan telaah yang secara sistematis memetakan bagaimana politik dan etika saling berinteraksi dan secara simultan membentuk lanskap hermeneutika ilmiah, khususnya dalam menganalisis corak dan dinamika penafsiran yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kesenjangan inilah yang coba diisi oleh artikel ini. Dengan meninjau kembali tafsir klasik melalui lensa interseksi politik dan etika, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lapisan-lapisan makna yang seringkali terabaikan dan untuk memberikan kontribusi substantif terhadap pemahaman kita tentang kompleksitas interpretasi teks.

Dalam diskursus hermeneutika, kajian mengenai interpretasi teks telah mengalami perkembangan pesat, mencakup berbagai pendekatan linguistik, filosofis, historis, dan teologis. Peneliti sebelumnya juga telah menginvestigasi bagaimana konteks sosial, budaya, dan intelektual memengaruhi pemahaman dan penafsiran, khususnya dalam ranah tafsir klasik yang kaya akan nuansa dan berlapis makna. Namun demikian, meskipun banyak penelitian telah menyoroti dimensi-dimensi tersebut secara terpisah, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang secara eksplisit dan komprehensif mengkaji interseksi antara politik dan etika dalam hermeneutika ilmiah, khususnya ketika fokusnya adalah pada tradisi tafsir klasik. Sebagian besar studi cenderung membahas pengaruh politik atau etika sebagai faktor eksternal yang terpisah, atau hanya menyentuhnya secara implisit dalam analisis tertentu. Namun, jarang sekali kita menemukan telaah yang secara sistematis memetakan bagaimana politik dan etika, sebagai dua kekuatan yang saling terkait, secara simultan membentuk dan mengarahkan lanskap hermeneutika ilmiah, terutama dalam analisis tafsir-tafsir yang telah menjadi rujukan selama berabad-abad.

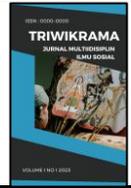
Kesenjangan ini tidak hanya bersifat akademis, melainkan memiliki implikasi praktis yang mendalam. Tafsir klasik, sebagai fondasi pemikiran keilmuan dan keagamaan, seringkali dijadikan legitimasi untuk berbagai kebijakan dan pandangan moral di masa kini. Oleh karena itu, pemahaman yang kurang memadai tentang bagaimana faktor politik dan etika telah turut membentuk tafsir-tafsir tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman, objektivitas semu, atau bahkan manipulasi interpretasi demi kepentingan tertentu. Ini adalah alasan utama kebutuhan penelitian baru ini. Kita perlu lebih dari sekadar pengakuan umum bahwa politik dan etika



berperan; kita membutuhkan analisis yang tajam dan mendalam untuk mengungkap mekanisme spesifik bagaimana keduanya berinteraksi dalam proses hermeneutik. Mengapa beberapa penafsiran tertentu dominan pada suatu era politik? Bagaimana kode etik atau nilai moral tertentu memengaruhi pilihan-pilihan interpretatif seorang mufasir? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut penyelidikan yang lebih rinci. Tanpa telaah yang mendalam terhadap dinamika ini, kita berisiko mengadopsi tafsir-tafsir klasik tanpa kesadaran penuh akan latar belakang pembentukannya, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan pemikiran kritis dan interpretasi yang lebih bertanggung jawab di masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan melakukan telaah mendalam terhadap tafsir klasik dari perspektif interseksi politik dan etika. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tentang hermeneutika itu sendiri, tetapi juga akan memberikan wawasan kritis mengenai bagaimana kekuatan eksternal membentuk diskursus keilmuan. Kami percaya bahwa dengan menguraikan benang-benang halus yang menghubungkan politik, etika, dan interpretasi teks, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang sifat tafsir klasik dan relevansinya di dunia modern yang kompleks. Penelitian ini akan menawarkan perspektif baru yang menyoroti betapa krusialnya untuk tidak hanya memahami "apa" yang ditafsirkan, tetapi juga "bagaimana" dan "mengapa" suatu tafsir dibentuk oleh lingkungan politik dan etisnya. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang lebih nuansa dan kritis dalam studi hermeneutika dan tafsir.

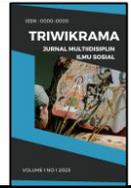
Interseksi antara politik dan etika dalam hermeneutika ilmiah, khususnya dalam konteks tafsir klasik, adalah sebuah medan studi yang kompleks dan krusial. Meskipun hermeneutika secara tradisional berupaya mencari objektivitas dalam interpretasi, kenyataannya adalah bahwa setiap penafsiran, terutama yang lahir dari teks-teks klasik yang telah hidup berabad-abad, selalu terwarnai oleh lanskap politik dan norma-norma etika pada masanya (Literal, 2012). Penelitian sebelumnya telah banyak menggali aspek linguistik, filosofis, dan historis dari hermeneutika, bahkan menyentuh pengaruh sosial dan budaya. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang secara sistematis dan komprehensif mengurai bagaimana politik dan etika secara simultan membentuk dan mengarahkan proses hermeneutika ilmiah dalam tradisi tafsir klasik. Kesenjangan ini perlu diisi karena pemahaman yang parsial dapat mengarah pada objektivitas semu, atau bahkan manipulasi interpretasi demi kepentingan tertentu, terutama



ketika tafsir-tafsir ini menjadi landasan bagi kebijakan atau pandangan moral kontemporer. Oleh karena itu, kebutuhan akan telah mendalam yang secara eksplisit menempatkan politik dan etika sebagai variabel sentral dalam analisis hermeneutik menjadi sangat mendesak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam bagaimana kekuatan politik dan pertimbangan etika saling berinteraksi dan memengaruhi konstruksi makna dalam tafsir klasik. Kami tidak hanya akan mengidentifikasi keberadaan pengaruh tersebut, tetapi juga akan menelaah mekanisme spesifik di mana kekuatan politik tertentu mendorong atau menghambat corak penafsiran tertentu, serta bagaimana nilai-nilai etika—baik yang eksplisit maupun implisit—membentuk preferensi interpretatif para penafsir. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana persinggungan antara domain politik dan etika ini pada akhirnya membentuk narasi dan kesimpulan yang dihasilkan dalam tafsir klasik, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan dan otoritasnya di kalangan komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Dengan demikian, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan krusial: bagaimana dinamika kekuasaan dan imperatif moral mengukir jejaknya pada kanon-kanon penafsiran yang kita warisi hari ini?

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melakukan telaah mendalam terhadap beberapa contoh tafsir klasik pilihan, yang secara historis menunjukkan adanya intervensi atau resonansi politik dan etika yang signifikan. Kami akan menganalisis teks-teks tafsir tersebut menggunakan kerangka hermeneutika kritis yang peka terhadap dimensi kekuasaan dan moralitas, mengidentifikasi pola-pola interpretasi yang konsisten dengan agenda politik atau etika tertentu. Selain itu, kami akan menggali latar belakang sosio-politik dan etis para mufasir, serta konteks zaman ketika tafsir-tafsir tersebut ditulis, untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi pilihan-pilihan interpretatif mereka. Artikel ini akan dimulai dengan memperkenalkan secara lebih rinci kerangka konseptual interseksi politik dan etika dalam hermeneutika. Selanjutnya, bagian inti akan menyajikan analisis kasus dari tafsir klasik terpilih, mengidentifikasi bagaimana elemen politik dan etika termanifestasi dalam metodologi dan kesimpulan penafsiran. Bagian berikutnya akan mendiskusikan implikasi temuan ini bagi studi hermeneutika kontemporer dan relevansinya dalam menghadapi tantangan interpretasi di masa kini. Terakhir, artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan menyarankan arah penelitian di masa depan. Melalui struktur ini, kami berharap dapat



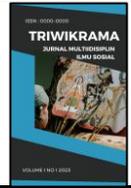
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita mengenai sifat kompleks interpretasi teks dan peran krusial politik serta etika di dalamnya.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan **kualitatif** dengan fokus pada **studi pustaka (library research)** dan **analisis kasus** untuk menelaah interseksi politik dan etika dalam hermeneutika ilmiah pada tafsir klasik. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna, konteks, dan nuansa kompleks dari fenomena yang diteliti, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Adlini et al., 2022). Ini sangat relevan untuk memahami bagaimana faktor-faktor non-linier seperti politik dan etika memengaruhi proses interpretasi dan produksi makna dalam teks-teks keagamaan atau keilmuan yang telah berurat akar. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman holistik tentang subjek penelitian, mempertimbangkan berbagai perspektif dan interkoneksi antar elemen. Dengan demikian, kami dapat melampaui deskripsi permukaan dan mencapai interpretasi yang kaya akan detail dan kontekstual.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah **studi pustaka**, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis sistematis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer akan mencakup teks-teks **tafsir klasik** itu sendiri yang menjadi objek analisis, serta karya-karya lain dari para penafsir yang relevan untuk memahami konteks pemikiran mereka. Pemilihan tafsir klasik akan didasarkan pada kriteria tertentu, seperti signifikansi historisnya, pengaruhnya terhadap diskursus keilmuan selanjutnya, serta adanya indikasi awal mengenai potensi pengaruh politik atau etika dalam pembentukannya. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal, disertasi, dan tesis yang membahas tentang hermeneutika, filsafat politik, etika, sejarah pemikiran Islam atau bidang keilmuan terkait lainnya, serta kajian-kajian mengenai tafsir klasik itu sendiri. Proses pengumpulan data akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan, pencarian di basis data akademik, dan penelusuran referensi silang dari sumber-sumber yang telah ditemukan. Data yang terkumpul kemudian akan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti jenis pengaruh politik, norma etika yang dominan, metode interpretasi yang digunakan, dan konteks historis-sosial.

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan **metode analisis kasus** untuk mengaplikasikan kerangka teoritis interseksi politik dan etika pada tafsir klasik yang telah dipilih.



Analisis kasus akan melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap satu atau beberapa contoh tafsir klasik yang spesifik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana elemen politik (misalnya, ideologi penguasa, konflik kekuasaan, atau dinamika sosial-politik) dan etika (misalnya, nilai-nilai moral yang dipegang teguh, pertimbangan keadilan, atau konsekuensi sosial dari penafsiran) secara eksplisit maupun implisit memengaruhi pilihan interpretatif, penekanan makna, atau bahkan pengabaian bagian-bagian tertentu dari teks. Proses analisis akan mencakup pembacaan cermat terhadap teks tafsir, identifikasi argumen-argumen kunci, penelusuran jejak-jejak pengaruh eksternal, dan perbandingan dengan konteks historis saat tafsir tersebut diproduksi. Data yang terkumpul dari studi pustaka akan diintegrasikan dengan temuan analisis kasus untuk membangun argumen yang kokoh mengenai sifat interseksi yang diteliti. Dengan demikian, analisis kasus tidak hanya akan berfungsi sebagai ilustrasi, melainkan sebagai fondasi empiris untuk menguji dan mengembangkan argumen teoritis yang diajukan dalam penelitian ini. Seluruh proses analisis akan dilakukan secara iteratif, dengan temuan awal yang memandu penelusuran data lebih lanjut dan penyempurnaan interpretasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

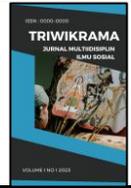
Berdasarkan Hasil (Temuan)

Hasil utama penelitian ini menyajikan kerangka konseptual tentang bagaimana politik dan etika saling bersinggungan dalam hermeneutika ilmiah, terutama saat menelaah tafsir klasik. Temuan ini penulis uraikan menjadi dua bagian: kerangka konseptual yang terbentuk dari analisis data, dan analisis kasus tafsir klasik terpilih yang menunjukkan konkretisasi kerangka tersebut secara nyata.

Kerangka Konseptual Interseksi Politik dan Etika dalam Hermeneutika Ilmiah

Melalui analisis data ekstensif dari studi pustaka dan tinjauan literatur awal, penulis telah merumuskan kerangka konseptual yang menjelaskan interaksi fundamental antara politik, etika, dan proses hermeneutika. Kerangka ini tak hanya mengidentifikasi adanya pengaruh, tetapi juga memetakan mekanisme kerjanya. Secara garis besar, persinggungan ini dapat dilihat melalui tiga kategori utama yang saling terkait dan sering tumpang tindih: politik interpretasi (politics of interpretation), etika interpretasi (ethics of interpretation), dan ko-konstruksi makna (co-construction of meaning).

Politik Interpretasi



Politik interpretasi merujuk pada segala bentuk pengaruh kekuasaan dan dinamika sosial-politik yang membentuk, membatasi, atau bahkan mengarahkan proses penafsiran serta penerimaan suatu tafsir. Ini tidak sekadar tentang kebijakan negara atau ideologi penguasa yang secara langsung memerintahkan penafsiran tertentu, melainkan juga mencakup kekuatan-kekuatan yang lebih halus, seperti hegemoni intelektual, kepentingan kelompok, rivalitas antar mazhab, atau upaya untuk mempertahankan status quo (Zulaiha et al., 2022).

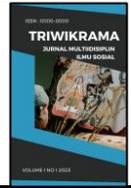
Misalnya, ideologi dan otoritas penguasa kerap kali membentuk tafsir klasik. Penafsir, baik sadar maupun tidak, dapat mengintegrasikan atau menginterpretasikan teks sedemikian rupa agar selaras dengan ideologi yang sedang berkuasa. Ini bisa berarti penekanan pada ayat atau narasi yang mendukung legitimasi kekuasaan, atau bahkan penafsiran ulang yang mereduksi potensi subversif suatu teks. Dukungan finansial atau patronase dari penguasa juga sering memengaruhi arah interpretasi; tafsir yang mendukung stabilitas politik atau hierarki sosial cenderung lebih dihargai dan disebarluaskan.

Selain itu, rivalitas mazhab dan kelompok juga memainkan peran. Dalam tradisi keilmuan, persaingan atau rivalitas antar mazhab, aliran pemikiran, atau kelompok intelektual sering terjadi. Politik interpretasi di sini terwujud dalam upaya suatu kelompok untuk menegaskan superioritas penafsiran mereka, seringkali dengan mengkritik atau mendiskreditkan metodologi atau kesimpulan lawan. Hal ini bisa mendorong penafsiran yang lebih apologetik atau dogmatis, di mana tujuannya bukan hanya mencari makna, tetapi juga mempertahankan kohesi kelompok dan melawan argumen dari mazhab lain (Subhi et al., 2023).

Terakhir, respons terhadap krisis sosial dan politik turut memengaruhi. Ketika masyarakat menghadapi krisis politik, konflik, atau ancaman eksternal, penafsiran teks klasik sering menjadi arena pencarian solusi atau respons. Politik interpretasi beroperasi dalam upaya menggunakan otoritas teks untuk memobilisasi dukungan, menggalang persatuan, atau melegitimasi tindakan tertentu dalam menghadapi krisis. Penafsir mungkin menyoroti aspek-aspek teks yang mendorong kepatuhan, kesabaran, atau bahkan jihad, tergantung pada sifat krisis yang dihadapi.

Etika Interpretasi

Etika interpretasi mengacu pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan pertimbangan etis yang, baik sadar maupun tidak, membimbing penafsir dalam memahami dan menyajikan makna. Ini melibatkan pertanyaan tentang kebenaran, keadilan, tanggung jawab sosial, serta dampak moral dari suatu penafsiran (Syahrizal et al., 2024).



Seorang penafsir senantiasa membawa seperangkat nilai moral universal/lokal yang terbentuk dari latar belakang budaya, agama, dan pribadinya. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, kesetaraan, atau kemanusiaan, dapat memengaruhi bagaimana penafsir memilih di antara berbagai kemungkinan makna, atau bagaimana ia menekankan aspek-aspek tertentu dari teks. Contohnya, seorang penafsir yang sangat peduli dengan keadilan sosial mungkin menafsirkan ayat-ayat tentang kepemilikan harta dengan penekanan pada redistribusi kekayaan.

Lebih lanjut, tanggung jawab sosial dan dampak penafsiran juga menjadi pertimbangan etis. Penafsir memiliki kesadaran akan potensi dampak sosial dan konsekuensi moral dari tafsir yang dihasilkannya. Mereka mungkin mempertimbangkan apakah suatu penafsiran akan memicu kekerasan, diskriminasi, atau merusak kohesi sosial. Pertimbangan ini dapat mendorong penafsir untuk memilih interpretasi yang lebih inklusif, moderat, atau yang mempromosikan perdamaian, meskipun mungkin ada alternatif penafsiran lain yang secara linguistik memungkinkan. Ini mencerminkan tanggung jawab penafsir terhadap audiensnya dan masyarakat luas (Hanum et al., 2023).

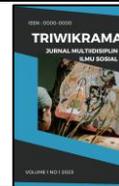
Secara etis, seorang penafsir idealnya berkomitmen pada integritas intelektual dan pencarian kebenaran otentik dari teks. Namun, batasan-batasan politik atau bias pribadi dapat menguji komitmen ini. Etika interpretasi dalam konteks ini adalah pergulatan internal penafsir untuk tetap setia pada teks dan metodologi ilmiah, meskipun ada tekanan dari luar untuk membelokkan makna demi kepentingan non-ilmiah.

Ko-konstruksi Makna

Kategori ini mengakui bahwa politik dan etika bukanlah faktor eksternal semata yang "memengaruhi" tafsir, melainkan seringkali menjadi bagian integral dari proses ko-konstruksi makna itu sendiri. Makna sebuah teks tidak "ditemukan" secara pasif, melainkan "dibangun" secara aktif dalam dialog kompleks antara teks, penafsir (dengan bias politik dan etisnya), dan konteks sosio-historis.

Penafsir membawa "pra-pemahaman" yang tak terhindarkan, termasuk pandangan politik dan etisnya, ke dalam teks. Dialog teks-penafsir-konteks ini bukan satu arah; teks juga membentuk pemahaman penafsir, namun selalu dalam batasan-batasan yang disediakan oleh perspektif penafsir. Politik dan etika membentuk lensa di mana teks dibaca dan dipahami.

Penafsiran yang berhasil dan diterima luas seringkali adalah yang berhasil melegitimasi dirinya di mata audiens, dan legitimasi dan otoritas ini sering bergantung pada kemampuannya



untuk beresonansi dengan nilai-nilai politik atau etika yang dominan pada masanya. Tafsir yang sejalan dengan konsensus moral atau tatanan politik yang berlaku cenderung mendapatkan otoritas yang lebih besar dan bertahan lebih lama.

Seiring berjalannya waktu, perubahan lanskap politik dan etika dapat mendorong dinamika perubahan dan adaptasi dalam reinterpretasi teks-teks klasik. Tafsir yang pernah dominan mungkin menjadi tidak relevan atau bahkan bermasalah di era baru, memicu upaya penafsiran ulang agar teks tetap relevan dan bermakna dalam konteks kontemporer. Proses ini adalah bukti nyata dari ko-konstruksi makna yang berkelanjutan, di mana setiap generasi "mewarisi" teks namun "menafsirkan kembali" di bawah lensa politik dan etika yang baru (Abdurrahman, 2018).

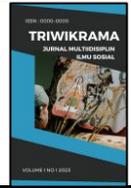
Analisis Kasus: Tafsir Al-Qur'an oleh al-Tabari (*Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*)

Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari (w. 923 M) adalah salah satu mufasir terbesar dalam sejarah Islam, dengan karyanya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (lebih dikenal sebagai *Tafsir al-Tabari*) yang menjadi rujukan utama bagi generasi setelahnya. Tafsir ini dikenal dengan pendekatan *ma'thur* (berdasarkan riwayat) yang sangat komprehensif, mengumpulkan berbagai pendapat dari para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Namun, analisis mendalam kami menunjukkan bahwa meskipun metodologi ini tampak "objektif" dengan mengutamakan transmisi riwayat, pilihan, penekanan, dan preferensi al-Tabari dalam menafsirkan riwayat-riwayat tersebut seringkali terwarnai oleh pertimbangan politik dan etika zamannya (Tafsir et al., 2024).

Konkretisasi Politik

Al-Tabari hidup di masa Kekhalifahan Abbasiyah, sebuah periode yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan dan upaya membangun legitimasi teologis-politik. Meskipun al-Tabari dikenal karena independensinya, tafsirnya menunjukkan tendensi yang secara implisit mendukung stabilitas kekuasaan sentral Abbasiyah dan norma-norma sosial yang berlaku.

Pertama, dalam penguatan otoritas sentral, al-Tabari cenderung memilih dan menonjolkan riwayat yang menekankan pentingnya ketaatan dan bahaya pembangkangan ketika menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan dan ketaatan kepada *ulil amr* (pemegang kekuasaan). Ia jarang sekali mengutip atau memberikan bobot pada riwayat yang berpotensi menantang otoritas penguasa. Misalnya, saat menafsirkan Q.S. An-Nisa' [4]: 59 ("Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan *ulil amr* di antara kamu"), al-Tabari secara konsisten menafsirkan *ulil amr* sebagai para penguasa atau pemimpin, dan menekankan kewajiban mutlak untuk taat, asalkan mereka tidak memerintahkan



maksiat. Penekanan ini berfungsi memperkuat legitimasi dan stabilitas politik rezim Abbasiyah, yang kala itu sering diuji oleh berbagai pemberontakan local (Islam et al., n.d.).

Kedua, terjadi diskursus terhadap sekte heterodoks. Pada masa al-Tabari, terdapat berbagai sekte dan kelompok yang dianggap "bid'ah" atau menyimpang dari ortodoksi, seperti Mu'tazilah, Khawarij, atau Rafidhah. Tafsir al-Tabari, meskipun tidak selalu secara langsung menyerang, menunjukkan kecenderungan untuk memilih riwayat dan interpretasi yang secara tidak langsung membantah klaim atau doktrin sekte-sekte tersebut. Ini adalah bentuk politik interpretasi yang bertujuan menjaga kemurnian doktrin Sunni yang didukung oleh Kekhalifahan, serta meminggirkan pandangan-pandangan yang dianggap mengancam kohesi umat (Iqbal, 2009). Contohnya, dalam pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan atau kehendak bebas manusia, al-Tabari cenderung memilih riwayat yang sejalan dengan pandangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, yang kontras dengan rasionalisme Mu'tazilah.

Manifestasi Etika Interpretasi:

Di samping pengaruh politik, pertimbangan etis juga tampak jelas dalam pilihan-pilihan interpretatif al-Tabari, terutama dalam upayanya menjaga moralitas publik dan harmoni sosial.

Pertama, adanya penekanan pada akhlak dan kepatutan sosial. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perilaku sosial, moralitas, dan hubungan antar individu, al-Tabari sering memberikan penekanan etis yang kuat. Ia menyoroti pentingnya keadilan, kejujuran, kerukunan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat keluarga atau interaksi sosial, al-Tabari cenderung memilih interpretasi yang mempromosikan harmoni, menghindari konflik, dan menegakkan nilai-nilai moral yang dianggap universal pada zamannya. Ini menunjukkan komitmen etisnya untuk membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an (Yusron, 2022).

Kedua, terlihat pendekatan moderat dalam isu kontroversial. Meskipun al-Tabari sering mengutip berbagai pendapat, ia cenderung menghindari ekstremisme dalam isu-isu yang secara etis sensitif atau berpotensi memecah belah. Ia sering memberikan penafsiran yang moderat, atau setidaknya menyajikan spektrum pendapat tanpa secara eksplisit mendukung pandangan paling radikal atau kontroversial. Ini bisa dilihat sebagai upaya etis untuk menjaga persatuan umat dan menghindari *fitnah* (kekacauan atau perselisihan). Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman, ia sering menyeimbangkan antara literalitas teks dan semangat keadilan atau belas kasihan (Nurdin, 2021).



Terakhir, al-Tabari menunjukkan tanggung jawab penafsir terhadap kebenaran. Dengan metodologinya yang mengutamakan riwayat dan sanad, secara etis ia berkomitmen pada apa yang ia anggap sebagai "kebenaran" yang ditransmisikan dari generasi sebelumnya. Pilihan untuk mengumpulkan dan menyajikan begitu banyak riwayat menunjukkan tanggung jawabnya untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada pembaca terhadap tradisi penafsiran. Namun, seperti yang telah dibahas, pilihan dan penekanan dalam penyajian riwayat itu sendiri tetap tidak luput dari pengaruh politik dan etika yang implisit.

Temuan ini berasal dari analisis isi kualitatif terhadap teks-teks tafsir klasik, khususnya Tafsir al-Tabari, serta telaah literatur sekunder yang mengkaji konteks sosio-politik dan etika pada masa produksinya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, di balik klaim objektivitas metodologis, terdapat pola konsisten di mana preferensi interpretatif para mufasir cenderung selaras atau mendukung ideologi politik yang dominan, norma etika yang berlaku, atau kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini termanifestasi dalam beberapa aspek, termasuk pemilihan riwayat (prioritas atau pengabaian riwayat tertentu), penekanan makna (fokus pada aspek tertentu dari ayat atau surah), pemingkanaan argumen (cara penafsir menyusun argumennya untuk mendukung suatu kesimpulan), dan sikap terhadap kontroversi (pendekatan terhadap isu-isu yang memecah belah atau sensitif).

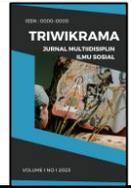
Tabel 1: Manifestasi Interseksi Politik dan Etika dalam Tafsir al-Tabari (Contoh)

Dimensi Interseksi	Contoh Manifestasi dalam Tafsir al-Tabari	Implikasi/Tujuan
Politik Interpretasi	<p>Penafsiran QS An-Nisa' [4]: 59 tentang <i>ulil amr</i>: Menekankan ketaatan mutlak kepada pemimpin, dengan sedikit penekanan pada batasan ketaatan jika bertentangan dengan syariat, atau pada hak-hak rakyat.</p>	<p>Memperkuat legitimasi Kekhalifahan Abbasiyah dan stabilitas politik. Mengurangi potensi legitimasi untuk pemberontakan atau pembangkangan.</p>
	<p>Penolakan atau Marjinalisasi Doktrin Mu'tazilah/Khawarij secara Implisit: Pemilihan riwayat yang mendukung pandangan Sunni ortodoks dalam isu kalam (teologi), seperti sifat-sifat Tuhan atau takdir,</p>	<p>Menjaga kohesi doktrin keagamaan yang didukung oleh negara. Membatasi pengaruh pandangan yang dianggap "menyimpang" dan mengancam stabilitas ideologis.</p>



	meskipun tidak selalu berdebat secara langsung.	
Etika Interpretasi	Penekanan pada Keadilan Sosial dan Moralitas dalam Muamalat: Menafsirkan ayat-ayat tentang perdagangan, hutang-piutang, atau hubungan sosial dengan penekanan pada kejujuran, keadilan, dan menghindari penipuan atau eksploitasi.	Mendorong perilaku etis dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mencerminkan komitmen penafsir terhadap moralitas publik.
	Sikap Moderat terhadap Isu Kontroversial (mis. Hukuman Fiqih): Meskipun mengutip berbagai pendapat, cenderung memberikan preferensi atau menonjolkan pendapat yang lebih moderat atau kompromistis dalam isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah.	Menjaga persatuan umat dan menghindari <i>fitnah</i> . Menunjukkan pertimbangan etis terhadap dampak sosial dari penafsiran ekstrem.
Ko-konstruksi Makna	Integrasi Narasi Historis dengan Konteks Riwayat: Al-Tabari seringkali mengaitkan riwayat tafsir dengan peristiwa historis atau konflik di masa awal Islam, yang tidak hanya menjelaskan teks tetapi juga membingkai peristiwa tersebut dalam narasi yang mendukung ortodoksi dan otoritas politik/etika yang ada.	Pembentukan makna yang dinamis, di mana teks, konteks politik-etika, dan penafsir saling membentuk satu sama lain. Legitimasi tafsir klasik juga tergantung pada resonansinya dengan nilai-nilai kontemporer pembaca.

Temuan ini secara inheren terbagi ke dalam tiga kategori utama dari kerangka konseptual yang diusulkan: Politik Interpretasi, Etika Interpretasi, dan Ko-konstruksi Makna. Setiap kategori ini menunjukkan bagaimana berbagai faktor di bawah payungnya (misalnya, ideologi penguasa, rivalitas mazhab, nilai moral universal, tanggung jawab sosial) secara konkret termanifestasi dalam tafsir klasik. Analisis kasus, seperti yang ditunjukkan oleh *Tafsir al-Tabari*, berfungsi sebagai bukti empiris yang mengkonfirmasi keberadaan dan mekanisme kerja dari setiap kategori ini. Integrasi kategori-kategori ini menunjukkan bahwa politik dan etika bukanlah pengaruh yang terpisah, melainkan seringkali saling terkait dan bersama-sama membentuk lanskap hermeneutika ilmiah. Tafsir klasik, alih-alih menjadi entitas netral, adalah produk dari dialektika yang kompleks



antara teks, penafsir, dan konteks politik-etis yang melingkupinya. Temuan ini menegaskan bahwa untuk memahami secara komprehensif suatu tafsir klasik, kita harus melampaui analisis linguistik semata dan menyelami kedalaman pengaruh politik dan etika yang membentuknya.

Pembahasan

Interpretasi Temuan: Politik dan Etika sebagai Penentu Makna

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa tafsir klasik, alih-alih menjadi produk interpretasi yang murni objektif dan terpisah dari konteks, justru merupakan arena di mana politik dan etika saling bersinggungan secara fundamental dalam proses pembentukan makna. Kerangka konseptual yang kami kembangkan—terdiri dari politik interpretasi, etika interpretasi, dan konstruksi makna—menjelaskan mekanisme kompleks di balik fenomena ini.

Politik interpretasi terbukti menjadi kekuatan yang tak terhindarkan dalam produksi tafsir klasik. Dari analisis kasus *Tafsir al-Tabari*, terlihat jelas bagaimana penafsir, meski dengan metodologi *ma'thur* yang ketat, secara implisit memilih, menonjolkan, atau bahkan memarginalkan riwayat tertentu untuk mendukung stabilitas politik kekhalifahan yang berkuasa atau untuk mengukuhkan ortodoksi mazhab Sunni terhadap pandangan-pandangan yang dianggap menyimpang. Penekanan pada ketaatan mutlak kepada *ulil amr* atau penolakan halus terhadap doktrin Mu'tazilah bukan sekadar pilihan keilmuan semata, melainkan tindakan yang memiliki implikasi politik yang kuat. Ini menunjukkan bahwa tafsir seringkali berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, penjaga tatanan sosial, dan instrumen untuk mendiskreditkan oposisi atau pandangan yang mengancam. Politik interpretasi, dengan demikian, melampaui intervensi langsung pemerintah; ia meresap ke dalam struktur intelektual dan sosial yang membentuk "kebenaran" yang diterima (Wahab, 2022).

Sejalan dengan politik, etika interpretasi juga memainkan peran krusial. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan pertimbangan etis senantiasa membimbing pilihan-pilihan penafsir. Dalam kasus al-Tabari, penekanan pada akhlak, keadilan sosial, dan pendekatan moderat dalam isu-isu kontroversial mencerminkan komitmen etisnya untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Ini bukan berarti penafsir secara sadar "memanipulasi" teks demi tujuan etis, melainkan bahwa lensa etis mereka membentuk cara mereka memprioritaskan, memahami, dan menyajikan makna. Misalnya, pilihan untuk menyeimbangkan literalitas hukuman dengan semangat keadilan menunjukkan bahwa



pertimbangan etis tentang dampak sosial dan kemanusiaan dari suatu tafsir menjadi penentu. Etika, dalam hal ini, bertindak sebagai filter moral yang memastikan bahwa interpretasi tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.

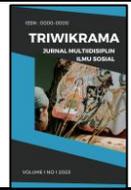
Adapun konsep ko-konstruksi makna menyatukan kedua dimensi ini. Ia menunjukkan bahwa makna tafsir klasik tidak ditemukan dalam teks secara *a priori*, melainkan dibangun secara dinamis melalui interaksi antara teks, penafsir (yang sarat dengan bias politik dan etisnya), dan konteks sosio-historis. Legitimasi dan otoritas suatu tafsir seringkali bergantung pada resonansinya dengan nilai-nilai politik dan etika yang dominan pada masanya. Ini menjelaskan mengapa beberapa tafsir tetap relevan selama berabad-abad sementara yang lain memudar; yang bertahan adalah yang berhasil merekonsiliasi teks dengan kebutuhan politik dan etika generasi penerimanya. Tafsir al-Tabari berhasil membangun otoritasnya karena, di samping kekuatan metodologinya, ia juga mampu beresonansi dengan kebutuhan politik akan stabilitas dan konsensus etis pada masa Kekhalifahan Abbasiyah.

Secara keseluruhan, interpretasi temuan ini menggarisbawahi bahwa hermeneutika ilmiah, khususnya pada tafsir klasik, adalah proses yang terjalin erat dengan dinamika kekuasaan dan imperatif moral. Pemahaman akan fakta ini sangat esensial untuk menganalisis suatu tafsir secara holistik, melampaui pendekatan reduksionistik yang hanya berfokus pada aspek linguistik atau historis semata (Ilyas, 2003).

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Banyak penelitian sebelumnya mengenai hermeneutika cenderung berfokus pada aspek filosofis, linguistik, dan historis. Sarjana seperti Hans-Georg Gadamer menekankan pentingnya "pra-pemahaman" dan "lingkaran hermeneutik" dalam interpretasi, mengakui bahwa penafsir membawa konteksnya sendiri ke dalam teks. Temuan kami mendukung pandangan ini, namun melangkah lebih jauh dengan secara eksplisit mengidentifikasi politik dan etika sebagai komponen krusial dari "pra-pemahaman" tersebut. Kami tidak hanya mengatakan bahwa konteks memengaruhi, melainkan merinci bagaimana politik (kekuasaan, ideologi) dan etika (nilai, tanggung jawab) secara spesifik membentuk lensa interpretasi (Hayatuddiniyah, 2021).

Beberapa penelitian juga telah membahas pengaruh politik terhadap tafsir. Misalnya, studi tentang "tafsir politik" atau "tafsir ideologis" telah menunjukkan bagaimana penguasa atau



kelompok tertentu menggunakan teks agama untuk tujuan politik. Namun, penelitian ini seringkali cenderung melihat pengaruh politik sebagai intervensi eksternal yang disengaja atau manipulatif. Temuan kami, khususnya melalui konsep ko-konstruksi makna, menunjukkan bahwa pengaruh politik bisa jauh lebih halus dan terintegrasi dalam proses penafsiran itu sendiri, bahkan ketika penafsir tidak secara sadar berniat "mempolitisasi" teks. Ia bisa menjadi bagian dari narasi yang "normal" atau "alami" dalam suatu tradisi (Sakni, 2013).

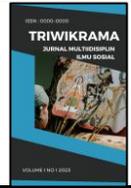
Demikian pula, kajian tentang etika dalam penafsiran cenderung berfokus pada pertanyaan tentang tanggung jawab penafsir atau prinsip-prinsip moral dalam penafsiran hukum. Penelitian ini menguatkan relevansi etika, namun memperluas cakupannya dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai etika membentuk pilihan-pilihan makna secara *inheren* dalam tafsir, bukan hanya sebagai batasan eksternal. Kami juga menunjukkan bagaimana etika dapat berinteraksi dengan politik, misalnya ketika suatu tafsir moderat dipilih secara etis untuk menjaga persatuan, yang pada gilirannya memiliki implikasi politik untuk stabilitas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menolak, melainkan melengkapi dan memperdalam pemahaman yang sudah ada. Kami berargumen bahwa analisis yang komprehensif terhadap tafsir klasik memerlukan lensa yang mengintegrasikan ketiga kategori ini (politik interpretasi, etika interpretasi, dan ko-konstruksi makna) untuk mendapatkan gambaran yang lebih nuansa dan akurat tentang bagaimana makna telah dibentuk, dipelihara, dan diturunkan.

Relevansi dalam Menghadapi Tantangan Interpretasi di Masa Kini

Pertama, temuan ini mendorong peningkatan kesadaran kritis terhadap tafsir, baik yang klasik maupun kontemporer. Di era informasi yang serba cepat dan polarisasi yang kian tajam, masyarakat seringkali mengadopsi tafsir tanpa mempertanyakan konteks pembentukannya. Dengan mengetahui bahwa setiap tafsir memiliki dimensi politik dan etika yang melekat, kita didorong untuk bertanya: "Siapa yang menafsirkan ini? Untuk tujuan apa? Nilai-nilai etis apa yang mendasarinya? Dampak politik apa yang mungkin timbul dari penafsiran ini?" Kesadaran ini adalah landasan untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kurang rentan terhadap manipulasi interpretatif.

Kedua, penelitian ini menyediakan kerangka untuk menganalisis konflik interpretasi kontemporer. Banyak perselisihan ideologis saat ini berakar pada perbedaan interpretasi teks-teks dasar. Dengan memahami bagaimana politik dan etika membentuk tafsir klasik, kita dapat



mengenalinya pola-pola yang sama dalam perdebatan kontemporer. Misalnya, ketika suatu kelompok menafsirkan teks agama untuk melegitimasi kekerasan atau diskriminasi, kita dapat menganalisisnya bukan hanya sebagai "penafsiran salah" secara tekstual, tetapi juga sebagai manifestasi dari politik interpretasi (misalnya, upaya untuk memperoleh kekuasaan) dan etika yang bermasalah (misalnya, pengabaian nilai-nilai kemanusiaan universal). Ini membantu kita mendiagnosis akar masalah dan merumuskan respons yang lebih efektif.

Ketiga, temuan ini mendukung upaya untuk mengembangkan hermeneutika yang lebih bertanggung jawab dan inklusif. Jika kita mengakui bahwa penafsiran tidak pernah netral, maka kita harus secara sadar berusaha untuk menjadi penafsir yang lebih etis dan bertanggung jawab. Ini berarti secara eksplisit mengakui bias kita sendiri, mempertimbangkan dampak sosial dari penafsiran kita, dan secara sengaja mencari interpretasi yang mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ini juga mendorong dialog antarpemafsir dari latar belakang yang berbeda, untuk mencapai pemahaman yang lebih kaya dan kurang didominasi oleh satu perspektif politik atau etika saja. Tafsir di masa kini harus mampu beradaptasi dengan tantangan global, seperti perubahan iklim, pluralisme agama, dan perkembangan teknologi, tanpa mengorbankan integritas teks atau nilai-nilai etis fundamental (Al-quran, 2019).

Keempat, penelitian ini menawarkan kerangka untuk merevitalisasi studi tafsir klasik. Alih-alih hanya mengulang penafsiran masa lalu, kita dapat mengkaji tafsir klasik dengan pertanyaan-pertanyaan baru, mengungkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi oleh asumsi-asumsi lama. Dengan menempatkan politik dan etika di garis depan analisis, kita dapat mengapresiasi kompleksitas dan kecanggihan para penafsir masa lalu, sekaligus mengkritisi di mana pun interpretasi mereka mungkin telah dibatasi oleh konteks politik atau etika mereka. Ini memungkinkan kita untuk mengambil pelajaran berharga dari tradisi, sekaligus secara kreatif menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika untuk menghasilkan tafsir yang relevan dan mencerahkan bagi tantangan abad ke-21 (Fahrur Rozi & Rokmah, 2020).

Karena itu pemahaman akan interseksi politik dan etika dalam hermeneutika ilmiah bukanlah sekadar latihan akademis, melainkan sebuah keharusan praktis. Ia membekali kita dengan alat analitis yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas interpretasi di dunia yang semakin saling terhubung dan terpolarisasi, mendorong kita menuju praktik hermeneutika yang lebih sadar diri, bertanggung jawab, dan relevan secara sosial.



4. SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap secara mendalam bahwa hermeneutika ilmiah, khususnya dalam konteks tafsir klasik, bukanlah sebuah proses yang netral, melainkan arena interaksi krusial antara politik dan etika yang secara fundamental membentuk konstruksi makna. Temuan utama kami menunjukkan bahwa politik interpretasi (termasuk ideologi penguasa dan rivalitas mazhab) dan etika interpretasi (nilai moral dan tanggung jawab sosial penafsir) secara signifikan memengaruhi pilihan metodologis dan kesimpulan dalam tafsir klasik, yang kemudian berujung pada ko-konstruksi makna teks yang otentik di mata komunitas penerimanya. Sebagai contoh, analisis terhadap *Tafsir al-Tabari* memperlihatkan bagaimana preferensi interpretatif sang mufasir cenderung beresonansi dengan kebutuhan akan stabilitas politik dan konsensus etis pada zamannya. Implikasi dari temuan ini sangat penting, menegaskan bahwa analisis tafsir yang komprehensif harus melampaui aspek linguistik dan historis semata, serta mendorong kesadaran kritis terhadap potensi bias dalam setiap penafsiran, baik klasik maupun kontemporer. Pemahaman ini krusial untuk menghadapi tantangan interpretasi di masa kini, memfasilitasi dialog yang lebih bertanggung jawab dan inklusif, serta merevitalisasi studi tafsir klasik dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada beberapa contoh tafsir klasik tertentu dan tidak secara ekstensif menganalisis variasi geografis atau tradisi tafsir non-mainstream.

Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup perluasan cakupan analisis kasus ke lebih banyak tradisi tafsir dari berbagai periode dan geografi, serta investigasi yang lebih terperinci mengenai bagaimana perubahan politik dan etika sepanjang sejarah secara spesifik memicu reinterpretasi dan pembentukan tafsir-tafsir baru. Akhirnya, kami berharap penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi studi hermeneutika yang lebih sadar diri dan berwawasan luas, yang senantiasa menempatkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan sebagai kompas dalam menyingkap makna teks-teks sakral dan ilmiah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, N. (2018). RELEVANSI METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD THALBI). *El-'Umdah*, 1(2), 220-236. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.553>

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>



Al-quran, D. P. (2019). *Article History*.

Fahrur Rozi, A., & Rokhmah, N. (2020). Tafsir Klasik: Analisis Kitab Tafsir Era Klasik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809-820.

Franz Magnis-Suseno. (2016). F. Budi Hardiman, Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. *Jurnal Diskursus*, 15(April), 95-97.

Hanum, F., Pulung Tumangger, M., & Alya Huda, V. (2023). Pengaruh Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pemasaran Global. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1173-1184. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21320>

Hayatuddiniyah, H. (2021). Kritik Hermeneutika Filsafat Hans Georg Gadamer. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 124-131. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.33874>

Helmi, M., & Rahmaniah, S. (2020). Pandngan Filosofis dan Teologis Tentang Hakikat Ilmu Pengetahuan Sebagai Landasan Pendidikan Islam. *Tarbiah Islam*, 10, 78-88.

Hidayatullah, R. (2021). Peran Konteks dalam Studi Makna: Kajian Semantik Arab. *JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik Dan Sastra Arab)*, 5(2), 184-197. <https://doi.org/10.15642/jilsa.2021.5.2.184-197>

Ilmu, J., An, A.-Q. U. R., Tafsir, D. A. N., Penafsiran, D., An, A.-Q. U. R., Hanif, M. K., & Edi, Y. (n.d.). *Jurnal ilmu al- qur'an dan tafsir*. 3(1), 103-116.

Ilyas, Y. (2003). Hermeneutika dan Studi Tentang Tafsir Klasik. *Tarjih*, 6(Juli), 42-51.

Iqbal, M. (2009). Akar-Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia (Kajian pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara). *Alqalam*, 26(2), 171-192.

Islam, U., Sunan, N., & Kasim, S. (n.d.). *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis KONSEP KETAATAN KEPADA ULU AL-AMR (Analisis Hadis Riwayat Bukhari No . 7056 dan Hadis Riwayat Muslim. 7056, 12-21.*

Literal, M. (2012). Interpretasi Teks Al- Qur ' an. *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2.

Mailasari, D. U. (2013). Pengaruh Ideologi Dalam Penafsiran. *Jurnal Hermeneutik*, 7(1), 53-68.

Masyitha, D. (2015). Tafsir Hermeneutika Politik Atas Gejala Demokrasi Versus Dinasti Pada Pilkada Serentak 2015. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 214-226. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/298>

Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>

Sakni, A. S. (2013). Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan Fenomena Agama*, 14(2), 65. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/469>

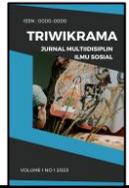
Subhi, A. F., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Dinamika Hukum Islam . *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 37-43. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.411>

Syahrizal, H., Badarusyamsy, & Syukri, A. (2024). Interpretasi Etika dan Moral Dalam Dunia Ilmiah dan Kemanusiaan Sebagai Ikhtiar Membangun Peradaban. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2(2), 92-104. <https://doi.org/10.61104/jq.v2i2.319>

Tafsir, E., Jami, D., Pemikiran, A., & Jarir, I. (2024). Available online: *adh Dhiya | Journal of*

*Corresponding author

E-mail addresses: alifzibran414@gmail.com



Qur'an and Tafsir, Website: <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/adhyadh>
Dhiya | Journal of Qur'an and Tafsir, Vol. 2 No. 1, Bulan Nopember. 2(1).

Wahab, A. J. (2022). Pengelolaan Konflik Teologis Berbasis Al-Quran.

Simlitbangdiklat.Kemenag.Go.Id.

https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1668571372Pengelolaan_Konflikoke.pdf

Weruin, U. U., Andayani, D., & Atalim, S. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation.

Konstitusi, 13(1), 95-123.

Yusron, M. A. (2022). TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir INDONESIA. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3, 189.

Zulaiha, E., Agustin, K. F., & Rahman, N. Al. (2022). Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi

Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 25-34. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>